



**PENGANIAYAAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

**(Studi kasus Ibu Muda di Pati yang Meninggal Akibat KDRT Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

**Muhammad Zainul Arifin  
Universitas Sriwijaya Palembang**

**Abstract**

---

Domestic violence for any reason from time to time will have an impact on the integrity of the family, which in the end can make the family fall apart. If this is the case, it is the children who suffer the most losses, especially for the future. Some time ago, a 31-year-old mother named Budiati was found dead while hugging her baby in Pati Regency, Central Java. He was found dead in the room of his rented house in Kutoharjo Village, Pati District, Pati Regency. In that room, two other Budiati children were also found hugging their mother's back in a weak condition. The victim did not necessarily die, everything that happened was an accumulation of abuse by her husband. Especially because the victim's condition is not fit after giving birth. In the end, the bruises caused the victim to die. The victim's husband admitted beating his wife. Mashuri said he was angry with his wife and abused her because she was jealous. Husband wants to see his wife's cellphone but is prohibited. This made the perpetrator suspect his wife had an affair. That is what underlies domestic violence by husbands which causes the death of his wife. The formulation of the problem that the author will make is First, How is the Legal Review of Domestic Violence Causing Death in Young Mothers that Happened in Pati, Central Java? Second, what are the factors that make people commit domestic violence? The type of research used in this study is normative legal research, "namely a type of legal research obtained from literature studies, by analyzing a legal issue through statutory regulations, literature and other reference materials related to violent crimes." In the Household

**Keywords:** Abuse, Domestic Violence, Young Mother, Pati, Central Java

**Abstrak**

---

KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian,

Muhammad Zainul Arifin

yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Beberapa waktu lalu Seorang ibu bernama Budiati berusia 31 Tahun ditemukan tewas sambil memeluk bayinya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ia ditemukan tewas di kamar rumah kontrakannya di, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Di kamar itu juga ditemukan dua anak Budiati lainnya yang tengah memeluk punggung sang ibu dengan kondisi lemah. Korban tidak serta merta meninggal dunia semua terjadi merupakan akumulasi dari penganiayaan yang dilakukan suaminya. Terlebih karena korban kondisinya belum fit pasca melahirkan. Akhirnya dipicu luka lebam itu, korban meninggal dunia. Suami korban mengakui melakukan pemukulan pada istrinya Mashuri mengaku marah pada istrinya dan melakukan penganiayaan karena dipicu rasa cemburu. Suami ingin melihat HP Istrinya namun dilarang. Hal ini membuat pelaku curiga istrinya punya selingkuhan. Itulah yang mendasari KDRT yang dilakukan suami hingga menyebabkan istrinya meninggal dunia. Adapun rumusan masalah yang akan penulis buat adalah *Pertama*, Bagaimana Tinjauan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian pada Ibu Muda Yang Terjadi di Pati, Jawa Tengah ? *Kedua*, Apa Faktor-Faktor Yang Membuat Orang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ? Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**Kata Kunci :** *Penganiayaan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Ibu Muda, Pati, Jawa Tengah*

## A. PENDAHULUAN

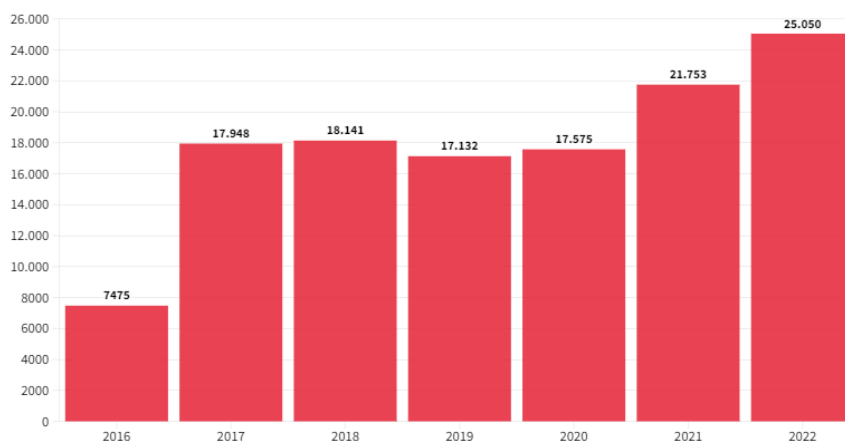
Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting untuk ditegakkan sebagaimana sebuah adagium mengatakan "*fiat justitia ruat caelum*", yang bermakna hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Penegakan hukum juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Hal tersebut dikukuhkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Amanat tersebut dapat dipahami bahwa Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segenap warga negara Indonesia untuk berada dalam kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan oleh karenanya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali (Kansil, 2002).

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi pada masyarakat karena faktor emosial adalah tindak pidana penganiayaan. Perempuan menjadi korban kekerasan paling dominan

Muhammad Zainul Arifin

yang terjadi di Indonesia. Menurut Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Republik Indonesia, tercatat sebanyak lebih dari 25 ribu perempuan menjadi korban kekerasan sepanjang tahun 2022 . Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.(News, 2023)

**Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dalam 6 tahun terakhir**



Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi penurunan kasus kekerasan, namun dalam 3 tahun terakhir terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sekitar 31% dengan total kenaikan sebesar 7.918 kasus. Dilihat berdasarkan usianya, 30,3% perempuan yang menjadi korban kekerasan adalah berusia 25-44 tahun. Adapun 51,8% kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkup rumah tangga. KPPA RI juga merilis bahwa hingga Oktober 2022, telah tercatat sebanyak 16.745 perempuan menjadi korban KDRT atau sebesar 79,5% dari total kasus KDRT di seluruh Indonesia (Rizaty, 2023). Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan pada wanita mayoritas dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dalam suatu hubungan rumah tangga. Perempuan menjadi korban dari keegoisan seorang laki-laki yang mengkristalisasi kemarahannya dengan melakukan kekerasan sebagai bentuk pelampiasannya. KDRT merupakan kekerasan yang terjadi di ranah personal. Tindakan KDRT seperti pemukulan, penganiayaan, hingga cacian kata-kata kasar dilakukan oleh suami terhadap istri, meskipun tak jarang dilakukan juga oleh istri kepada suaminya. Beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya KDRT adalah masalah ekonomi, prinsip, hingga perselingkuhan (Rosmawati, 2018).

Muhammad Zainul Arifin

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmoni dan bahagia yang sering disebut keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Pada kenyataannya bahwa tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan saling takut dan benci di antara sesamanya . Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ironisnya jumlah kekerasan yang terjadi semakin hari semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Lihat tabel di bawah ini) (Rizaty, 2022)



KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya.

Perilaku kekerasan merupakan respons terhadap stresor yang dihadapi seseorang yang ditunjukkan dengan perilaku aktual melakukan kekerasan, baik pada diri sendiri, orang lain

Muhammad Zainul Arifin

secara fisik maupun psikologis. (Zubaedi, 2007). Perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan aduh, gelisah yang tidak terkontrol. Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana klien mengalami perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri, lingkungan termasuk orang lain dan barang-barang. Perilaku kekerasan atau suatu tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan dengan melakukan tindakan yang keliru karena hilangnya kontrol diri akibat adanya stresor yang menjadi permasalahan secara fisik maupun psikologis yang mengakibatkan bahaya terhadap diri sendiri, individu lain maupun lingkungan. (Anak., 2020)

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Dalam perspektif pekerjaan sosial, ini menjadi *focus* pekerja sosial untuk berperan dalam upaya menolong/ membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang tentunya menghambat hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya, sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan sesuai amanat pasal 10 berkaitan Hak-Hak Korban pada huruf (d) yakni pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Venny Andriana, 2019)

KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya

Beberapa waktu lalu Seorang ibu bernama Budiati berusia 31 Tahun ditemukan tewas sambil memeluk bayinya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ia ditemukan tewas di kamar rumah kontrakkannya di, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Di kamar itu juga ditemukan dua anak Budiati lainnya yang tengah memeluk punggung sang ibu dengan kondisi lemah. Kedua anak tersebut diketahui berusia 4 dan 2 tahun. Keduanya lemas karena hampir dua hari makan seadanya. Sementara sang bayi harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami dehidrasi. Dari hasil penyelidikan terbuka kabar bahwa Budiati dibunuh oleh

Muhammad Zainul Arifin

suaminya sendiri Mashuri yang berusia 45 tahun. Mayat Budiarti pertama kali ditemukan Ketua RT setempat.

Mayat korban Ketahuan karena anak yang bayi nangis lama tidak diberi susu. Akhirnya ketua RT mendobrak dan melihat korban sudah meninggal dunia. Mertua korban yakni Bapak Gunadi juga menangkap gelagat Mashuri yang tampak gelisah saat warga melaporkan terkait kematian Budiarti ke polisi. Jenazah Budiarti diautopsi untuk mengetahui secara pasti penyebab kematiannya. Dari hasil otopsi memang disimpulkan bahwa sebelum tewas Budiarti sempat menerima tindakan penganiayaan. Hasil otopsi ditemukan memar-memar di kepala korban yang pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia

Korban tidak serta merta meninggal dunia semua terjadi merupakan akumulasi dari penganiayaan yang dilakukan suaminya. Terlebih karena korban kondisinya belum fit pasca melahirkan. Akhirnya dipicu luka lebam itu, korban meninggal dunia. Suami korban mengakui melakukan pemukulan pada istrinya Mashuri mengaku marah pada istrinya dan melakukan penganiayaan karena dipicu rasa cemburu. Suami ingin melihat HP Istrinya namun dilarang. Hal ini membuat pelaku curiga istrinya punya selingkuhan. Itulah yang mendasari KDRT yang dilakukan suami hingga menyebabkan istrinya meninggal dunia.

Berangkat dari masalah diatas maka penulis tertarik meneliti kajian dengan judul : **PENGANIAYAAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi kasus Ibu Muda di Pati yang Meninggal Akibat KDRT Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)** dengan harapan dapat memberikan khazanah baru dalam ilmu pengetahuan terkhusus kasus KDRT yang terjadi dan menyebabkan korban KDRT mengalami Kematian. Adapun rumusan masalah yang akan dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian pada Ibu Muda Yang Terjadi di Pati, Jawa Tengah ?
2. Apa Faktor-Faktor Yang Membuat Orang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-

bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga . (Soerjono Soekanto, 1985)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan konsep (*conseptual aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkutan paut dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .(Ibrahim, 2006)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga . (Muhammad, 2004)

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian**

Pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa perempuan khususnya istri mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki atau suaminya. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak sudah menjadi isu internasional sebagaimana ditetapkan dalam CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimintion Against Women) sebagai instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979 (Gunawan, 2015). Pada tahun 1980 Indonesia menandatangani Konvensi CEDAW yang memengaskan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki di semua aspek, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun sipil . Pada akhirnya, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dibentuk pada tahun 1982 setelah Konvensi CEDAW dinyatakan berlaku. Komite ini bertugas mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan kepada Komite dari negara-negara peserta. Lebih lanjut Indonesia meratifikasinya pada tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (A. S. Dkk, 2007).

Akhirnya, 20 tahun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia kembali mengesahkan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi seorang perempuan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Muhammad Zainul Arifin

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari kekerasan atau ancaman kekerasan, namun tidak hanya terbatas pada perempuan saja, meskipun secara statistik perempuan merupakan korban KDRT paling banyak. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang, bahwa Undang-Undang ini juga dibentuk karena dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan suatu perilaku baik yang bersifat terbuka atau tertutup maupun yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada lawannya. KDRT sering terjadi dalam sebuah keluarga namun kekerasan ini tidak terungkap dengan baik karena sifatnya *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) (L. Dkk, 2018). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa KDRT adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Penghapusan KDRT adalah “jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 memberikan definisi yang jelas berkaitan dengan KDRT dengan menggarisbawahi bahwa akibat dari adanya KDRT tidak hanya penderitaan secara fisik, melainkan juga secara seksual dan psikologis termasuk juga penelantaran rumah tangga serta ancaman perbuatan yang melawan hukum dalam suatu rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan KDRT telah merubah paradigma dengan membawa kasus KDRT dari wilayah privasi keluarga ke ranah publik. Ruang lingkungnya bahwa tidak hanya meliputi suami istri, melainkan lebih luas lagi dengan melibatkan orang dalam lingkup rumah tangganya seperti anak-anak dengan modus kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Korban KDRT berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagai ditentukan dalam undang-undang ini. Adanya pasal-pasal yang memuat hak-hak korban diharapkan dapat memberikan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berlarut-larut (Setiawati, 2022). Sebagai contoh dalam undang-undang ini, seorang ayah bisa dijerat pidana jika menelantarkan anak-anaknya.



Muhammad Zainul Arifin

Sebagaimana konsideran Undang-Undang Penghapusan KDRT, bahwa pada dasarnya undang-undang ini dibentuk sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat agar terbebas dari kekerasan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Namun dalam praktiknya, penyelesaian perkara di pengadilan belum secara maksimal mengedepankan hak-hak korban. Banyak ditemukan bahwa korban KDRT kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang hanya memberi keterangan sebagai saksi, sehingga peluang untuk memperjuangkan haknya sangat kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak pemulihan keadaan akibat tindak kejahatan yang diterimanya. Hal ini disebabkan pelaku dan korban dalam kasus KDRT mempunyai hubungan kekerabatan dan emosional yang sangat dekat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebenarnya bermaksud untuk menjaga marwah rumah tangga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Setiap individu dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus dilandasi oleh ajaran agama. Perempuan sebagai korban mayoritas dari KDRT seharusnya mendapatkan kasih sayang dari seorang suami yang tidak merendahkan harkat martabat seorang perempuan sesuai nilai-nilai ajaran agama.

Suami yang melakukan KDRT dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 2) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”;
- 3) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”;
- 4) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap

Muhammad Zainul Arifin

isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Unsur objektif berupa melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Unsur dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) meliputi suami, isteri, dan anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Oleh karena itu, apabila suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, maka dapat disimpulkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya sedikit berbeda dengan tindak kekerasan personal/komunitas yang hanya berdimensi fisik. Tindakan tersebut justru berdimensi luas, yang tidak terbatas hanya pada tindakan secara fisik. Ia termasuk juga tindakan yang menghalang orang untuk berkreasi dan mengaktualisasikan diri sesuai potensi yang dimilikinya, dan tindakan memaksanya untuk bekerja atau memaksimalkan potensi dirinya melebihi batas kemampuannya. Dalam batas-batas tertentu, termasuk juga larangan untuk bekerja dan berpenampilan sesuai keinginan, dan larangan untuk berhubungan dengan orang-orang yang disukai. Karena itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dimensi non-fisik, yang melingkupi seluruh perbuatan yang dapat menyebabkan komitmen untuk saling percaya, berbagi, toleran, dan mencintai antarseluruh anggota dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan suci perkawinan dan kehidupan rumah tangga harmoni, tercederai. (Manan, 2008)

Dengan demikian, tindakan suami atau istri melarang pasangannya berpenampilan sesuai keinginannya seperti berbusana muslimah atau berjenggot sekalipun, misalnya, sudah tergolong tindak kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi bila cara-cara berpenampilan seperti itu telah disepakati sebelum perkawinan sebagai pilihan bebas masing-masing. Demikian pula perilaku selingkuh yang menghadirkan perempuan atau laki-laki idaman lain dalam kehidupan rumah tangga bagaikan istri atau suami sendiri seperti belakangan ini marak di kalangan selebriti dan politisi terhormat kita. Cakupannya masih dapat diluaskan lagi ke

Muhammad Zainul Arifin

bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti memaksa anak untuk memilih jenis pendidikan dan bidang studi yang tidak sesuai dengan minat dan potensi dirinya.(Perempuan, 2021)

Ada empat tipe kekerasan, di antaranya: “physical abuse, psychological abuse, material abuse or theft of money or personal property, dan violation of right”. Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif. Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan secara detil.(Wahab, 2019)

**Pertama**, “kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat” (Pasal 6). “Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dsalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman”.(Dermawan, 2007)

**Kedua**, “Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7)”. Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.(Dermawan, 2007)

**Ketiga**, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8):(Dermawan, 2007)

- a. “Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”
- b. “Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”(Dermawan, 2007)

**Keempat**, Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

Muhammad Zainul Arifin

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9). Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti : penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol perolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan “pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikatakan bahwa yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan”. Lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:(Tangga, 2004)

- a. “Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam kondisi tertentu, korban KDRT diharuskan memilih apakah ingin mempertahankan perkawinannya atau keluar dari penderitaan. Dampak psikis tersebut sebenarnya membuat korban dalam hal ini perempuan mengalami tekanan batin yang sangat dalam sehingga secara emosional korban yang pada dasarnya adalah istri pelaku menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya. Namun ada juga yang rela memendam emosinya demi mempertahankan

keutuhan rumah tangganya . Kementerian PPPA merilis bahwa terdapat 4 faktor besar yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumaah tangga diantaranya:(RI, 2018)

### 1. Faktor Individu

Faktor individu dapat dimaknai sebagai faktor kondisi internal dari korban yang berpotensi mengalami kekerasan fisik. Ketidakharmonisan yang disebabkan karena sikap perempuan sebagai istri yang sering menekan psikologis suami dalam hal apapun . Misalnya istri menuntut suami untuk selalu hadir atau menemani tanpa memperhatikan kondisi suami apakah sedang lelah atau tidak setelah seharian mencari nafkah. Terkadang suami merasa tidak dihargai dan sering terjadi perkecokan mulut menyebabkan suami sering bermain kasar terhadap istrinya.

Berdasarkan data Kementerian PPPA, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

### 2. Faktor Pasangan

Faktor ini dimaknai sebagai faktor kehadiran orang ketiga di dalam rumah tangganya. Masalah suami selingkuh menjadi hal paling utama mengapa terjadi KDRT. Hal ini dikarenakan emosi istri yang memuncak ketika mengetahui suaminya memiliki wanita idaman lain, sedangkan suami yang sudah berselingkuh cenderung berlaku kasar terhadap istrinya.

Selain selingkuh, seorang suami yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran menjadikannya bersikap temperamental terhadap anggota keluarga rumahnya. Budaya patriarki menyebabkan laki-laki sebagai suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari perempuan sebagai istri . Sehingga kebanyakan seorang suami menganggap istri adalah miliknya yang mutlak dan bebas melakukan apa pun (Nurwati, 2021). Selain itu, Kementerian PPPA juga menyimpulkan bahwa perempuan yang memiliki suami menganggur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami KDRT dibandingkan bekerja. Perilaku buruk suami yang terpengaruh minuman keras dan main perempuan bahkan cenderung 1,56 kali lebih besar melakukan KDRT terhadap istrinya.

### 3. Faktor Sosial Budaya

Muhammad Zainul Arifin

Kehidupan sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakat. Di zaman modern yang mengedepankan kesetaraan gender, baik laki-laki maupun perempuan memiliki posisi yang sama dalam dunia pekerjaan. Inilah yang menyebabkan banyak terjadi percekocokan antara suami dan istri karena sulitnya beradaptasi dengan perubahan zaman. Seorang istri yang memiliki mobilitas pekerjaan yang tinggi sulit membagi waktu antara urusan pekerjaan dan urusan rumah tangga. Begitupun dengan suami yang bekerja *full time* dan tidak menentu, sering mengabaikan kepentingan keluarga. Jika tidak dikelola dan dikomunikasikan dengan baik, hal ini akan berdampak pada percekocokan karena masing-masing merasa haknya dalam rumah tangga diabaikan (Nurhasanah, 2020).

Data Kementerian PPPA menyebutkan bahwa perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami KDRT dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan karena faktor sosial budaya yang berbeda. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri juga dapat menjadi salah satu pemicu KDRT.

#### 4. Faktor Ekonomi

Permasalahan finansial menjadi faktor paling dominan yang menyebabkan rumah tangga mengalami percekocokan. Percekocokan yang berlarut-larut pada akhirnya berujung pada kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan sebagai istri, meskipun tidak menutup kemungkinan laki-laki sebagai suami. Penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadi sebuah permasalahan klasik, apalagi jika istri merupakan ibu rumah tangga yang hanya menggantungkan keadaan kepada suaminya. Berdasarkan data Kementerian PPPA, istri dari keluarga non sejahtera berpotensi mengalami KDRT oleh suaminya. Pelaku KDRT sebagian besar adalah buruh yang notabene merupakan kalangan menengah ke bawah di Indonesia. Selain itu, masalah PHK yang dialami suami juga menjadi hal yang sangat berpotensi menimbulkan emosional pada suami, di satu sisi istri menuntut kebutuhan rumah tangga yang tidak sedikit (Nurhasanah, 2020).

Dari beberapa kategori faktor-faktor menyebabkan terjadinya KDRT, dapat dipahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam meminimalisir tindak pidana KDRT. Sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk ikatan lahir batin antara sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka

seudah semestinya antara sepasang suami istri harus saling menyayangi dan melengkapi satu sama lain. Maka yang perlu dipahami bahwa hubungan suami dan istri bukanlah hubungan antara atasan dan bawahan atau majikan dan pembantu, melainkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki hak dan kewajiban berlandaskan prinsip-prinsip religius yang bersama-sama membangun kekokohan rumah tangga melalui ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholdizon*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam .

### **3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian**

Seringkali akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota lain dalam rumah tangga secara tidak langsung. Tindak kekerasan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya, misalnya, dapat meninggalkan kesan negatif yang mendalam di hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga yang lain . Kesan negatif ini pada akhirnya dapat pula menimbulkan kebencian dan malah benih-benih dendam yang tak berkesudahan terhadap pelaku.(Yenti, 2016)

Bukan itu saja, rumah tangga yang dibangun untuk kepentingan bersama akan berantakan. Dalam pada itu, tidak jarang sang pelaku turut menderita karena depresi dan tekanan mental berlebihan yang dialaminya akibat penyesalan yang tiada lagi berguna. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korban yang terbentuk dari pola pikir dan pandangan hidup (*world view*) berdasar kebudayaan dan sistem nilai yang ia jalankan . Agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dalam pandangan sosiologis merupakan sebuah pranata sosial di samping institusi keluarga, pendidikan, ekonomi, dan politik. Meskipun agama sesungguhnya bukan merupakan sebuah sistem nilai, akan tetapi ajaran-ajaran yang dikandungnya akan bekerja dalam hati dan pikiran untuk memungkinkan pemeluknya membangun sistem nilai tersendiri yang dipedomani dalam menjalankan kehidupannya . Karena itu, perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi dan mereka sandarkan sepenuhnya kepada nilai-nilai budaya lokal maupun global melainkan juga dipengaruhi oleh kepercayaan atau agama yang mereka anut.(P, 1986)

Kekerasan terhadap perempuan bisa muncul karena tindak kekerasan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perempuan berada pada posisi termarginalkan. Ada beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain: kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan terhadap perempuan

Muhammad Zainul Arifin

dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara.(Fakih, 2012)

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksualitas, atau psikologis, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan) . Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, di mana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.(Zubair, 2011)

Sementara itu, dampak psikologis KDRT yaitu: “merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur mimpi buruk, hilangnya rasa percaya diri, untuk bertindak merasa tidak berdaya, hilangnya minat untuk merawat diri, tidak teratur pola hidup yang dijalani, menurun konsentrasi seseorang, sering melakukan perbuatan ceroboh, rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang ada, pendiam, enggan untuk ngobrol, sering mengurung diri di kamar, hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak, selalu merasa kebingungan dan mudah lupa, sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri, berperilaku berlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri, agresif, menjadi karakter yang tempramen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak”.(Subhan, 2004)

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat :

1. Tinjauan hukum kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian yang terjadi di Pati, Jawa tengah menjadi pelajaran untuk berhati-hati dalam bersikap. Ini



Muhammad Zainul Arifin

berdampak buruk bagi anak hasil KDRT . Ia akan takut dengan orang tua dan memiliki trauma dan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Maka semoga dengan kasus ini suami belajar untuk berhati-hati dalam bersikap terutama untuk tidak mudah memukul istri atau pasangannya.

2. Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan cacat atau kematian dapat dipidana lebih dari 10 tahun. Sebab menghilangkan nyawa seseorang merupakan pidana berat atau penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat atau luka permanen bagi seseorang.

## 2. Saran

KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya

## D. DAFTAR PUSTAKA

Anak., K. P. P. (2020). *Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA.* ” <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Dermawan, M. K. (2007). *Teori Kriminologi, edisi kedua.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka,.

Dkk, A. S. (2007). *Laporan Pengkajian Hukum tentang Optional Protocol Cedaw terhadap Hukum Nasional yang berdampak pada Pemberdayaan Perempuan.*

Dkk, L. (2018). Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT. *Jurnal Hukum Islam, XVIII(1).*

Fakih, M. (2012). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ).*

Gunawan, S. (2015). Tinjauan Yuridis Perempuan sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 4(2).*

Muhammad Zainul Arifin

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.

Kansil, C. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

Manan, M. 'Azzam. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 10.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.

News, M. T. (2023). *KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022*. <https://www.metrotvnews.com/play/B2lCrdXL-Kemenpppa-Rilis-Data-Jumlah-Kasus-Kdrt-Di-Indonesia-Hingga-Oktober-2022>.

Nurhasanah, S. (2020). Pencabutan Pengaduan Oleh Istri Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami. *Journal of Law*, 7(1).

Nurwati, R. A. N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan. *Journal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1).

P, N. (1986). 6 Sumber <http://www.google.id/http://www.crayonpedia.org/wiki/index.php>, memuat pandangan Nugroho P. yang menyatakan bahwa Horton dan Hunt (1987) merumuskan pranata sosial sebagai suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang dianggap .

Perempuan, K. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19." CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020. In *Kajian Komnas Perempuan* `.

RI, K. (2018). *Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya*. Kemenpppa.Go.If.

Rizaty, M. A. (2022). *Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022* Artikel ini telah tayang di [DataIndonesia.id](https://dataindonesia.id) dengan judul "Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022"., Author: Monavia Ayu Rizaty. Editor: Dimas Bayu. *Klik selengkapnya di sini*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>.

- Rizaty, M. A. (2023). *Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022*. DataIndonesia.Id.
- Rosmawati, E. (2018). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10(2), 62.
- Setiawati, S. (2022). *Peran Penyidik Dalam Proses Mediasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Soerjono Soekanto, S. M. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*.
- Subhan, Z. (2004). *Kekerasan terhadap Perempuan (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara,)*.
- Tangga, U.-U. N. 23 T. 2004 tentang P. K. D. R. (2004). *Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419*.
- Venny Andriana. (2019). Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta. *Yayasan Jurnal Perempuan*, 12(1), 45.
- Wahab, R. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif*.
- Yenti, M. dan. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi. *Esensia*, 17(2), 265.
- Zubaedi. (2007). Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta. In *Ar-Ruzz*.
- Zubair, M. K. (2011). Membongkar Teks Sebagai Bias Gender Dalam Pemahaman Islam. *Jurnal Al- Ma'iyah*, 14(2), 64.